



DESI RUSMIATI, ANDI SUWIRTA & MOCH ERYK KAMSORI

Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Menanggapi Perkembangan Politik di Indonesia, 1950-1965

IKHTISAR: Artikel ini, dengan menggunakan metode sejarah, mengkaji pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis terhadap perkembangan politik di Indonesia tahun 1950-1965. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, sehingga hal itu mempengaruhi karakter dan pandangan mereka. Perubahan politik yang terjadi di Indonesia direspon oleh kedua tokoh tersebut. Rosihan Anwar menyambut baik pemberlakuan konsep Demokrasi Liberal di Indonesia, namun Mochtar Lubis memandang pesimis pemberlakuan konsep tersebut. Orientasi politik kedua tokoh tersebut juga berbeda, yakni Rosihan Anwar mendukung PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan mengagumi Sutan Sjahrir. Sedangkan Mochtar Lubis hanya sebatas bersimpati kepada partai-partai politik, dan bahkan mendukung tentara Indonesia untuk berpolitik. Mengenai kebebasan pers, kedua tokoh memiliki pandangan yang sama, walaupun Mochtar Lubis – dibandingkan dengan Rosihan Anwar – sangat keras dalam mengkritik Presiden Soekarno, yang dinilai membatasi kebebasan pers di Indonesia. Akhirnya, baik surat kabar “Pedoman” milik Rosihan Anwar maupun “Indonesia Raya” milik Mochtar Lubis, keduanya dibredel oleh pemerintah Indonesia.

KATA KUNCI: Pandangan Politik; Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis; Kebebasan Pers.

ABSTRACT: “The Views of Rosihan Anwar and Mochtar Lubis in Responding to Political Development in Indonesia, 1950-1965”. This article, using the historical method, examines the views of Rosihan Anwar and Mochtar Lubis on political developments in Indonesia in 1950-1965. The results showed that Rosihan Anwar and Mochtar Lubis had different life backgrounds, so that it affected their characters and views. The political changes that took place in Indonesia were responded to by these two figures. Rosihan Anwar welcomed the implementation of the Liberal Democracy concept in Indonesia, but Mochtar Lubis felt pessimistic about the implementation of the concept. The political orientation of the two figures is also different, namely Rosihan Anwar supports to PSI (Indonesian Socialist Party) and admiring Sutan Sjahrir. Mochtar Lubis, on the other hand, was limited to sympathizing with political parties, and even supported the Indonesian army for politics. Regarding press freedom, the two figures shared the same views, although Mochtar Lubis – compared to Rosihan Anwar – was very strict in criticizing President Soekarno, who was seen as limiting press freedom in Indonesia. Finally, both the “Pedoman” newspaper owned by Rosihan Anwar and “Indonesia Raya” owned by Mochtar Lubis, both were banned by the Indonesian government.

KEY WORD: Political Views; Rosihan Anwar and Mochtar Lubis; Press Freedom.

About the Authors: **Desi Rusmiati, S.Pd.** adalah Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. **Andi Suwirta, M.Hum.** dan **Moch Eryk Kamsori, S.Pd.** adalah Dosen Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Korespondensi penulis: desirusmiati12@gmail.com

Suggested Citation: Rusmiati, Desi, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori. (2018). “Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Menanggapi Perkembangan Politik di Indonesia, 1950-1965” in *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Volume 6(2), September, pp.117-134. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808.

Article Timeline: Accepted (May 20, 2018); Revised (July 3, 2018); and Published (September 30, 2018).

PENDAHULUAN

Perkembangan politik di Indonesia merupakan satu aspek yang menarik untuk dikaji, terutama ketika Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Sistem Demokrasi Liberal merupakan titik awal dalam menentukan nasib sendiri, dimana para politisi di Jakarta sepakat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dan untuk mewujudkannya, maka Indonesia menggunakan konsep Demokrasi Liberal seperti yang diterapkan oleh negara-negara Barat. Cita-cita kehidupan yang lebih baik ketika diterapkannya sistem Demokrasi Liberal ternyata belum dapat terwujud. Masalah yang pertama muncul, ketika pemberlakuan sistem Demokrasi Liberal, adalah tentara yang menuntut agar parlemen segera dibubarkan dan berkembang menjadi konflik internal dalam tubuh tentara. Didalam pemerintahan sendiri, kabinet sering mengalami pergantian yang mempengaruhi stabilitas politik Indonesia (Compton, 1993; Feith, 1995 dan 2007; Maarif, 1996; Hakiki, Saiman & Suri, 2011; dan Wijaya, 2014).

Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan PEMILU (Pemilihan Umum) pertamanya, dengan harapan agar masalah-masalah politik yang terjadi dapat selesai sesegera mungkin (Suhadi, 1981; Sanit, 1997; Feith, 1999; Wardaya, 2004; dan Permadi, 2014). Namun pada kenyataannya, menurut M.C. Ricklefs (2008), hal tersebut hanya memperjelas peta politik dan tidak menyelesaikan masalah (Ricklefs, 2008:521). Selain itu, di daerah terjadi protes terhadap pemerintahan pusat yang dinilai terlalu sibuk mementingkan elite politik, sedangkan daerah tidak begitu diperhatikan. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya krisis ekonomi, yang mendorong pemerintah pusat mengeluarkan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) atau status negara

dalam keadaan darurat perang (cf Feith, 1995 dan 2007; Muhaimin, 2005; dan Ricklefs, 2008).

Dikeluarkannya status tersebut, sedikit demi sedikit, menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai menjauh dari konsep Demokrasi Liberal, yang diberlakukan sejak tahun 1950. Terutama ketika Konstituante (badan pembentuk Undang-Undang Dasar) belum dapat menyelesaikan tugasnya dalam menyusun Konstitusi Indonesia. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk mulai mengatur kehidupan negara dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini menandai bahwa sistem Demokrasi Liberal yang selama ini diberlakukan, kini sudah digantikan dengan Konsep Presiden, atau yang dikenal dengan konsep Demokrasi Terpimpin (Lev, 1990; Nasution, 1995; dan Feith, 1995 dan 2007).

Sistem Demokrasi Terpimpin, yang diharapkan oleh Presiden Soekarno, merupakan demokrasi yang dipimpin oleh seseorang dan dapat bekerjasama dengan berbagai golongan yang ada di Indonesia, seperti golongan Tentara, golongan Islam, golongan Komunis, dan juga golongan Nasionalis. Kerjasama antar golongan, yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, pada kenyataannya memperjelas peta politik yang ada pada waktu itu, karena kekuatan yang kini muncul, ketika Demokrasi Terpimpin, adalah TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat), Soekarno, dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Ketiga kekuatan tersebut sama-sama memiliki kepentingan politik masing-masing (Feith, 1995 dan 2007; Muhaimin, 2005; dan Ricklefs, 2008).

Dalam konteks ini, baik TNI-AD maupun PKI sama-sama mempercayai tentang akan adanya suatu periode kepemimpinan setelah Presiden Soekarno (Anwar, 1981:41). Dalam pertarungan kekuatan antara TNI-AD

dan PKI tersebut, Presiden Soekarno berperan sebagai penyeimbang dari keduanya, sehingga boleh juga dikatakan bahwa pada tahun 1960-an terjadi fenomena *Triangle Struggles* (pertarungan segi tiga) di Indonesia, yakni antara PKI, Presiden Soekarno, dan TNI-AD (Feith, 1995 dan 2007; Muhaimin, 2005; dan Ricklefs, 2008).

Perkembangan politik demikian menarik media massa untuk mengamati dan memberitakan bagaimana keadaan politik di Indonesia pada zamannya. Bagi media massa, terutama surat kabar, periode ini merupakan zaman yang tidak pernah sepi dalam membicarakan masalah politik (Smith, 1986; Hutaauruk, 2008; dan Suwirta, 2008). Termasuk bagi dua tokoh pers Indonesia, yaitu Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, yang memiliki pandangan tersendiri dalam melihat kondisi politik tersebut. Kedua tokoh ini memiliki sikap yang kritis mengenai kondisi politik di Indonesia, yang dituangkan melalui tulisan-tulisan mereka dalam surat kabarnya masing-masing (Said ed., 1992; Suwirta, 2008; dan Hill, 2011).

Pada tahun 1948, Rosihan Anwar mendirikan surat kabar *Pedoman* yang terbit di Jakarta (Anwar, 1983:161). Setahun kemudian Mochtar Lubis mendirikan surat kabar *Indonesia Raya*, yang juga terbit di Jakarta (Lubis, 1992). Kedua surat kabar tersebut merupakan representasi dari kedua tokoh berkenaan, karena pada periode itu berkembang istilah *personal journalism*, yakni apa yang terdapat dalam pemberitaan dan pandangan sebuah surat kabar adalah sesuai dengan visi, misi, dan kepentingan dari pemimpin redaksinya (Atmakusumah ed., 1997; dan Suwirta, 2004). Dalam konteks ini, Atmakusumah ed. (1997) mengungkapkan bahwa di masa lalu, *personal journalism* di Indonesia merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh pemimpin redaksi dalam menuliskan tajuk rencananya

(Atmakusumah ed., 1997:xix).

Dengan adanya fenomena *personal journalism* dalam dunia pers di Indonesia, maka menarik untuk mengkaji bagaimana pandangan-pandangan politik dari kedua tokoh tersebut, yakni Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, selama tahun 1950-1965. Selain itu, kajian ini juga untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang memang sudah ada, tetapi dalam periode yang berbeda, serta belum ada penelitian yang membandingkan pandangan politik dari kedua tokoh tersebut (*cf* Anwar, 1981; Atmakusumah ed., 1992; Said ed., 1992; Hadimadja ed., 1995; Semma, 2008; dan Hill, 2011). Sehingga, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam menanggapi perkembangan politik di Indonesia pada tahun 1950-1965?

Tulisan ini, dengan demikian, mengkaji bagaimana pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis terhadap pelaksanaan sistem Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966); orientasi politik pada masa itu; serta tentu saja sebagai seorang wartawan, mereka akan melihat bagaimana konsep dan implementasi kebebasan pers di Indonesia pada masa itu.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan penulisan mengenai sejarah nasional dalam bidang pers, khususnya tokoh-tokoh pers yang memiliki peranan penting dalam perkembangan media massa di Indonesia (Soebagijo, 1981; Said ed., 1992; Suwirta, 2004; dan Hill, 2011). Selain itu, kajian ini diharapkan menjadi salah satu materi ajar bagi guru dalam pembelajaran sejarah mengenai perkembangan pers dan perkembangan politik di Indonesia pada tahun 1950-1965 (Said, 1988; Supriatna, 2006; dan Suwirta, 2008 dan 2010).

Pers tidak hanya berperan dalam

menyampaikan beragam informasi dan opini yang dinilai penting pada zamannya, tetapi pers juga dalam kondisi tertentu dituntut untuk menentukan sikap dan menerima konsekuensinya, seperti yang tercermin dalam pandangan-pandangan yang disampaikan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis sebagai seorang pemimpin redaksi dari surat kabar *Pedoman* dan *Indonesia Raya* di Jakarta (Surjomihardjo ed., 2002; Suwirta, 2008; Laily, 2016; dan Aprianto, 2018).

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang dinilai relevan dengan pembahasan, yaitu konsep mengenai biografi. Karena penelitian ini membahas dua tokoh penting dalam bidang pers, yakni Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, maka kajiannya juga menggunakan konsep tokoh dalam dimensi sejarah. Selain itu, dalam tulisan ini juga menggunakan konsep individu dan perubahan sosial, politik, serta media massa dan kebebasan pers. Konsep-konsep tersebut berperan dalam menganalisis topik kajian mengenai bagaimana perkembangan politik di Indonesia pada tahun 1950-1966 dalam sudut pandang dua tokoh pers (Soebagijo, 1981; Anwar, 1983; Amri, 2008; Hill, 2011; dan Daud, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang merupakan cara untuk menggambarkan suatu peristiwa sejarah dengan mengkaji secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau, yang disebut dengan sumber-sumber sejarah (Ismaun, 2005:34; Ali, 2005; dan Abdurahman, 2007). Metode sejarah merupakan cara untuk melakukan rekonstruksi terhadap kehidupan manusia di masa lampau. Metode sejarah juga memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu *heuristik* atau mengumpulkan sumber yang relevan dengan kajian

(Gosttchlak, 1985; Ismaun, 2005; dan Abdurahman, 2007).

Sumber sejarah yang digunakan adalah sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal, dan surat kabar maupun sumber-sumber lainnya. Tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh dan akan digunakan. Sumber-sumber sejarah yang tersedia tidak dipercayai begitu saja untuk dijadikan referensi, tetapi perlu dipertimbangkan sumber-sumber tersebut tentang layak atau tidak layak melalui tahapan kritik (Kuntowijoyo, 1995; Abdurahman, 2007; dan Sjamsuddin, 2007:132).

Kritik sumber dalam disiplin ilmu sejarah, dengan demikian, dibagi menjadi dua tahapan, yaitu: (1) *kritik eksternal*, yang menitikberatkan kepada keaslian sumber yang diperoleh dan harus menjawab beberapa pertanyaan yang menunjukkan bahwa sumber tersebut dapat membantu peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan, seperti siapa yang menulis sumber tersebut, apa tujuan dari penulisan, dan sebagainya; serta (2) *kritik internal*, yang berkaitan dengan isi atau substansi dari sumber tersebut, yakni apakah dapat diandalkan atau tidak (Gosttchlak, 1985; Kuntowijoyo, 1995; Abdurahman, 2007; dan Sjamsuddin, 2007). Dalam konteks ini, Ismaun (2005) menyatakan bahwa *kritik internal* berfokus kepada kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh melalui tahapan *heuristik* (Ismaun, 2005:50).

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, yang disertai dengan menggunakan konsep-konsep dan/ atau teori-teori dari ilmu-ilmu sosial lainnya untuk dijadikan alat analisis dari interpretasi. Interpretasi juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidimensional, yang memiliki peran dalam menyusun berbagai informasi

yang telah diperoleh (Hamid, 2004; Sjamsuddin, 2007; Burke, 2008; dan Kartodirdjo, 2014). Tahapan terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Dalam penulisan sejarah ini disajikan penulisan yang bercorak analitis-kritis untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian, dengan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi yang komprehensif (Kuntowijoyo, 1995; Sjamsuddin, 2007; dan Zed, 2008).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan tokoh dalam melihat suatu permasalahan tidak terbentuk begitu saja, tetapi ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, termasuk latar belakang kehidupan dari tokoh-tokoh bersangkutan, termasuk dalam hal ini Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis. Dalam konteks ini, Rosihan Anwar – sebagaimana terpapar didalam otobiografinya, mengungkapkan bahwa ia lahir di Kubang Nan Dua, Sumatera Barat, pada tanggal 10 Mei 1922, dari seorang ibu bernama Siti Safiah dan ayah yang bernama Maharadja Soetan, yang bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda sebagai Asisten *Demang* (Anwar, 1983:19). Manakala Mochtar Lubis juga lahir di tahun yang sama dengan Rosihan Anwar, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1922, di Sumatera Barat. Mochtar Lubis merupakan anak keenam dari pasangan Mara Husein Lubis dengan gelar *Raja Pandapotan* dan Siti Madinah Nasution (dalam Hill, 2011:19).

Kedua tokoh pers tersebut, dengan demikian, berasal dari keluarga yang bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda, yakni bahwa ayah dari masing-masing mereka adalah seorang pamong praja. Meskipun sama-sama mengabdikan kepada pemerintah kolonial Belanda, tetapi pendidikan yang dilalui oleh Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis jauh berbeda. Rosihan Anwar diberikan

kebebasan dalam menentukan setiap pilihan dalam hidup, dan harus menerima konsekuensinya, termasuk ketika mulai bersekolah di HIS (*Holland Inlandsche School* atau Sekolah Dasar Belanda) sampai dengan AMS (*Algemene Middelbare School* atau Sekolah Menengah Belanda) – Bagian A di Yogyakarta, dengan bidang yang dipilihnya adalah Sastra Klasik Barat (Said ed., 1992:295).

Mochtar Lubis juga mengenyam pendidikan dasar yang sama di HIS, namun karena ayahnya memiliki prinsip bahwa cukup dia saja yang bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda, sehingga ketika melanjutkan pendidikan pun Mochtar Lubis bersekolah di INS (*Indonesisch Nederlandsche School* atau Sekolah Swasta Indonesia) Kayutanam di Sumatera Barat (Hill, 2011:26). Meskipun semasa sekolah di sana, Mochtar Lubis kurang menyukai sekolah tersebut, tetapi di sanalah jugalah Mochtar Lubis remaja mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang kelak bermanfaat bagi dirinya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh para pendidik di INS Kayutanam, khususnya dari S.M. Latif, pendiri Sekolah Ekonomi di INS Kayutanam, yang tidak bosan-bosannya mengingatkan para siswa agar terus belajar dan didukung dengan menyediakan berbagai macam buku, yang menjadi koleksi perpustakaan sekolah (Lubis, 1980:201).

Proses pendidikan dan lingkungan tersebut mempengaruhi pandangan kedua tokoh dalam melihat suatu masalah, termasuk ketika pemberlakuan sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia, dari tahun 1950 hingga tahun 1966. Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, dengan demikian, memiliki cara pandang tersendiri terhadap konsep dari demokrasi, baik yang bersifat universal maupun yang

kontekstual di Indonesia. Rosihan Anwar (1983), misalnya, menyatakan sebagai berikut:

Demokrasi menuju pada hidup damai, tertib dengan dan atas persetujuan. Di negara kita sama artinya dengan hidup gotong-royong atas keinginan dan kehendak sendiri, dengan tiada paksaan. Lebih luas dan sempurna terselenggara kerakyatan akan menyebabkan pula kurangnya sifat-sifat paksaan dan apa yang dirasakan sebagai gencetan dan pembatasan. Orang yang bekerja keras atas kehendak dan keyakinannya sendiri [...] (Anwar, 1983:185).

Pernyataan di atas merupakan konsep demokrasi yang ada dalam pemikiran Rosihan Anwar. Namun sayangnya, ketika awal pemberlakuan konsep demokrasi ini, mulai mendapat tantangan dan sebagian golongan yang meragukan penerapan konsep tersebut. Konsepsi mengenai Demokrasi Liberal, misalnya, yang diharapkan dapat memberikan perubahan lebih baik untuk negara yang belum lama merdeka, namun apa yang menjadi harapan ternyata terhalang dengan pembentukan kabinet yang tidak berjalan mulus, sehingga mempengaruhi kelancaran dari pelaksanaan konsep Demokrasi Liberal dan menyusul beberapa permasalahan lainnya (Anwar, 1983; Ali, 1993; dan Laily, 2016). Meskipun konsep Demokrasi Liberal yang diterapkan di Indonesia menuai beragam masalah, tetapi Rosihan Anwar (1983) menilai bahwa tidak seutuhnya demokrasi dengan kata “liberal” memiliki makna yang tidak baik. Rosihan Anwar (1983), kemudian, menyatakan sebagai berikut:

Bagaimana dia sampai kepada penamaan demikian dan apa yang dimaksudnya dengan “liberal” tidaklah jelas bagi saya. “Liberalisme”, aliran kebebasan, tidak selalu mempunyai konotasi jelek seperti digambarkan oleh Sukarno. Tetapi ya sudahlah, yang jelas Sukarno tidak senang dengan “demokrasi liberal” yang berlaku setelah tahun 1949 dan

berlangsung sampai tahun 1959 (Anwar, 1983:170).

Sementara itu, Mochtar Lubis sendiri juga memiliki cara pandang yang berbeda mengenai konsep demokrasi, terutama sistem Demokrasi Liberal, yang diterapkan di Indonesia. Mochtar Lubis berpendapat bahwa konsep Demokrasi Liberal yang diterapkan di Indonesia tidak akan membuat negara ini maju, karena setiap kabinet yang berkuasa tidak bertahan lama dan terus berganti dalam waktu yang sangat singkat, sehingga apa yang menjadi program suatu kabinet tidak dapat berjalan secara optimal. Keresahan lain timbul, menurut Mochtar Lubis, karena parlemen berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab (dalam Atmakusumah ed., 1992; Semma, 2008; dan Hill, 2011). Lebih lanjut, Mochtar Lubis menyatakan sebagai berikut:

Karena cemas akan prospek adanya kekacauan publik, Mochtar mendukung militer sebagai benteng untuk melawan keresahan. Ia ingin parlemen dibubarkan dan syarat-syarat lebih ketat ditetapkan untuk pembentukan partai politik guna menghentikan kelompok-kelompok kecil dengan kepentingan-kepentingan kawasan sempit untuk membentuk partai politik independen (dalam Hill, 2011:55).

Masalah awal yang muncul dan menjadi perbincangan publik ketika diterapkannya sistem Demokrasi Liberal adalah peristiwa 17 Oktober 1952, yakni demonstrasi TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat) di depan Istana Presiden di Jakarta, yang menuntut agar Parlemen dibubarkan dan segera dilaksanakan PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia (Crouch, 1999; Feith, 1999 dan 2007; Wardaya, 2004; Muhaimin, 2005; dan Permadi, 2014). Dalam sebuah wawancara, pada tanggal 27 Januari 1981, Mochtar Lubis mengenang kembali apa yang

terjadi dalam peristiwa tersebut dan mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikannya kepada militer bukan tanpa alasan, karena sistem partai liberal tidak akan memberikan kemajuan kepada Indonesia yang sering mengganti kabinet, sehingga menimbulkan kekacauan terhadap pemerintahan (dalam Hill, 2011:54).

Para politikus yang duduk dalam Parlemen justru berpendapat bahwa menentukan urusan militer adalah hak mereka. Namun sebagian perwira TNI-AD menentangnya, karena urusan internal militer harus diselesaikan oleh pimpinan militer sendiri, tidak boleh dicampuri oleh para politisi sipil. Dalam pandangan pihak TNI-AD pula bahwa sejarah militer di Indonesia memiliki peran yang penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, lebih-lebih ketika para pemimpin sipil, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, menyerah kepada Belanda pada bulan Desember 1948. Jadi hanya pimpinan TNI-AD yang tidak menyerah kepada musuh dan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bukan politikus sipil (Crouch, 1999; Muhaimin, 2005; dan Ricklefs, 2008:498).

Dalam konteks ini, Mochtar Lubis yang semula mendukung TNI-AD untuk berpolitik, nampaknya tidak semuanya bersetuju ketika Indonesia menggunakan konsep Demokrasi Terpimpin pada tahun 1957-1959, yang digagas oleh Presiden Soekarno dan malah didukung oleh pimpinan TNI-AD sendiri. Mochtar Lubis (1980) tidak sepakat dengan keputusan Presiden dan meragukan kehidupan yang lebih baik, termasuk bagi dirinya sendiri, yang harus tinggal dalam rumah tahanan tanpa tahu kapan akan bebas (cf Lubis, 1980; Legge, 1996; Muhaimin, 2005; Hill, 2011; dan Adams, 2014). Sikap pesimis Mochtar Lubis terhadap sistem Demokrasi Terpimpin tersebut ditunjukkan dengan pernyataannya, sebagai berikut:

Bulan-bulan cepat lewatnya, keadaan di negeri kita tidak bertambah baik, perekonomian mundur terus-menerus, Soekarno masih maju dalam usahanya untuk membina kekuasaan pribadinya di tanah air kita. Kaum Komunis dapat angin baik sekali dan bertambah hari bertambah berhasil menjalankan infiltrasinya kemana-mana (Lubis, 1980:147).

Pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1966) memang tidak disambut baik oleh Mochtar Lubis, yang merupakan pendukung kehidupan yang bebas, demokratis, dan bertanggung jawab, sehingga ia melihat konsepsi Presiden tersebut telah menimbulkan sosok pemimpin yang otoriter. Mochtar Lubis (1980) juga mengkritisi apa yang dimaksud dengan “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Bertanggung Jawab”, seperti yang dikemukakan oleh Mohamad Hatta, mantan Wakil Presiden RI (Republik Indonesia) yang pertama dan telah mengundurkan diri pada tahun 1956 (cf Lubis, 1980; Noer, 1990; Hatta, 2004; Alfarisi, 2010; dan Hill, 2011).

Mochtar Lubis (1980) melihat bahwa konsep Demokrasi Terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno menimbulkan kecenderungan “pemimpin di atas segalanya”, dalam artian bahwa rakyat harus mengikuti dan tunduk kepada pemimpinnya (Lubis, 1980:127-128). Manakala Mohamad Hatta (2004) melihat tentang perlunya sosok pemimpin yang muncul dari bawah, melalui proses pendidikan dan kaderisasi yang baik, sehingga pemimpin dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan kepada rakyat kebanyakan (Hatta, 2004). Dalam konteks perbandingan pandangan tersebut, sosok Mochtar Lubis (1980) nampaknya memiliki kecenderungan yang sama dan setuju dengan apa yang digagaskan oleh Mohamad Hatta (2004), karena dengan konsep kepemimpinan tersebut akan melahirkan sistem demokrasi yang sejati (Lubis, 1980, Noer, 1990; Hatta,

2004; Alfarisi, 2010; dan Hill, 2011).

Sikap pesimis terhadap sistem dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1966) ternyata tidak hanya diperlihatkan oleh Mochtar Lubis, karena Rosihan Anwar juga memiliki pandangan yang sama mengenai ketidaksetujuannya dengan konsepsi Presiden tersebut. Rosihan Anwar (1981 dan 1983) melihat bahwa periode Demokrasi Terpimpin bukanlah awal yang baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia yang sebenarnya (Anwar, 1981 dan 1983). Hal tersebut juga terlihat dalam surat kabar *Pedoman* di Jakarta, yang memuat berita dan opini dengan judul “Demokrasi Terpimpin atau Meletjehkan Demokrasi?”, yang ditulis oleh Mohamad Hatta dan berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin merupakan suatu konsepsi yang muncul karena melihat krisis demokrasi dan krisis kewibawaan (*Pedoman*, 27/8/1957:1).

Latar belakang pendidikan Rosihan Anwar, yang bergaya Barat, telah mendorong ia membaca berbagai referensi mengenai apa yang dimaksud dengan “demokrasi”. Demokrasi yang ia melihat di negara-negara maju adalah demokrasi yang seringkali memiliki standar tertentu, seperti adanya pemilihan umum yang bebas; adanya kompetisi yang sehat dalam partai-partai politik; sampai dengan adanya sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan. Tetapi Rosihan Anwar juga menyadari bahwa di negara-negara dunia ketiga dan berkembang, hal tersebut sulit untuk diterapkan, termasuk juga di Indonesia (Anwar, 1983 dan 1992; Said ed., 1992; dan Laily, 2016).

Berdasarkan pemikiran itulah, maka Rosihan Anwar melihat bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia, antara tahun 1960-1965, merupakan periode yang menguntungkan bagi penguasa untuk melakukan segala hal yang sesuai dengan keinginannya,

seperti menjebloskan lawan-lawan politik kedalam penjara tanpa alasan dan peradilan yang jelas; padahal tindakan pemimpin seperti itu tidak dibenarkan dalam kehidupan demokrasi yang sehat (Anwar, 1983:127; Said ed., 1992; dan Laily, 2016). Lebih lanjut, Rosihan Anwar (1983) menyatakan sebagai berikut:

Tidak adanya standar yang jelas di negara-negara berkembang tersebut telah memberikan peluang kepada penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang cenderung otorier.

Sang diktator mengontrol posisi-posisi kunci pada pimpinan, suatu kombinasi elite sosial dan kumpulan-kumpulan kekuasaan yang terdiri dari unsur-unsur seperti tentara, polisi, birokrasi, golongan bangsawan, kelas yang punya uang dan harta, dan kelompok-kelompok dominan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Sang diktator mengusahakan tercapainya suatu keseimbangan kekuasaan di antara elite-elite tadi, atau dia menghadapi kelompok-kelompok yang mendukungnya jadi saling bertentangan (Anwar, 1983:129).

Pernyataan yang dikemukakan oleh Rosihan Anwar tersebut, apabila dianalisis lebih jauh, maka kondisi politik itulah yang muncul dan berkembang di Indonesia selama penerapan konsep Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Manipol USDEK (Manifesto Politik tentang Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi, dan Ekonomi Terpimpin, serta Kepribadian Bangsa), misalnya, menjadi propaganda pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya (Anwar, 1981 dan 2006; Feith, 1995; Legge, 1996; dan Adams, 2014). Namun dalam catatan Rosihan Anwar (1981), sistem Demokrasi Terpimpin dengan arah politik pemerintah tersebut tidak membuat kondisi Indonesia lebih baik, tetapi semakin terpuruk, baik dalam elite politik maupun dalam kehidupan rakyat banyak (Anwar, 1981:3).

Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis mengenai sistem dan

pelaksanaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia berpengaruh juga dalam orientasi politik mereka selama tahun 1950-1965. Rosihan Anwar (1983), misalnya, sebagaimana dinyatakan juga oleh Salim Said (2006), merupakan salah satu pengagum tokoh Sutan Sjahrir, atau disebut juga dengan *Sjahririan*. Kekaguman tersebut telah berpengaruh dalam membentuk orientasi politik dari Rosihan Anwar sendiri, tetapi hal tersebut tidak serta-merta lahir begitu saja (Anwar, 1983; dan Said, 2006:xiii).

Bagaimana awal Rosihan Anwar kagum terhadap Sutan Sjahrir digambarkan secara baik oleh William Frederick & Soeri Soeroto eds. (2005), yang mengungkapkan mengenai orientasi politik dari Rosihan Anwar sendiri. Sejak masa pergerakan nasional di Indonesia (1908-1945), Rosihan Anwar melihat bahwa ada tiga tokoh utama yang berjuang pada masa tersebut, yaitu Mohamad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Soekarno. Namun ketika Soekarno dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda, maka pandangannya hanya tertuju kepada dua tokoh yang ada, yaitu Mohamad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang memegang peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia agar mencapai kemerdekaannya (Anwar, 1983; dan Frederick & Soeroto, 2005:446).

Orientasi politik yang lebih menitikberatkan kepada tokoh Mohamad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang memegang paham Sosialisme itu, terus berlanjut ketika diberlakukannya sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1950-1966). Paham Sosialismenya Rosihan Anwar semakin kokoh dengan menerbitkan majalah *Siasat*, bersama Soedjatmoko, yang merupakan sarana dan media bagi PSI (Partai Sosialis Indonesia) dalam menyalurkan gagasan-gagasan politiknya. Paham Sosialisme yang diusung oleh PSI ini adalah “sosialisme-kerakyatan”,

dimana menjunjung derajat manusia yang menghargai pribadi manusia dari segala cita-cita kerakyatan, sehingga hal itulah yang dipandang sebagai Sosialisme yang sesungguhnya di mata PSI, terutama Sutan Sjahrir (Anwar, 1983:119; Legge, 1993; Gaffar, 2000; Hutauruk, 2008; dan Laily, 2016).

Orientasi politik tersebut juga terlihat ketika MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan PSI dibubarkan oleh pemerintah Soekarno berdasarkan Keputusan No.200 Tahun 1960 dan Keputusan No.201 Tahun 1960 untuk membubarkan kedua partai tersebut (Kartasasmita *et al.*, 1981:160; Noer, 2000; dan Ricklefs, 2008). Dengan pembubaran kedua partai politik tersebut, surat kabar *Pedoman* di Jakarta, mempertanyakan kenapa MASYUMI dan PSI harus dibubarkan? Rosihan Anwar (1981 dan 1983) juga mempertanyakan alasan dari penangkapan tokoh-tokoh PSI yang sangat mengencwakkannya, karena apabila alasan penangkapan itu disebabkan oleh tokoh-tokoh partai telah ikut dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), bagaimana dengan PARKINDO (Partai Kristen Indonesia), yang pada waktu itu juga Sekretaris Jenderalnya ikut dalam Kabinet PRRI dan masih ada anggota partai tersebut yang menjadi bagian dari PRRI? (Anwar, 1981 dan 1983; Mahmud, 1992; Ricklefs, 2008; dan Solehuddin, 2015).¹

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Soekarno, dengan adanya pembubaran MASYUMI dan PSI, memperlihatkan keberpihakan penguasaan kepada sekelompok tertentu, yang dapat diamati dari kebijakannya terhadap PARKINDO sendiri, yang tidak mengalami nasib sama dengan kedua partai yang telah dibubarkan tersebut. Dukungan

¹Lihat juga, misalnya, berita “Soal Pengakuan: Pembubaran Partai2” dalam surat kabar *Pedoman*. Djakarta: 7 Djuli 1960, hlm.3.

Rosihan Anwar, dengan surat kabar *Pedoman*-nya, tidak hanya diberikan untuk partai-partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah saja, tetapi juga mendukung tokoh-tokoh sentralnya, terutama dalam PSI, yang tidak lain adalah Sutan Sjahrir sendiri. Rosihan Anwar (1981 dan 1983) terus mengikuti perkembangan politik yang dilalui oleh Sutan Sjahrir selama pemerintahan Soekarno. Mantan Perdana Menteri Republik Indonesia pertama (1945-1947) itu, Sutan Sjahrir, mendapat perhatian khusus dari Rosihan Anwar. Bahkan Salim Said (2006) mengungkapkan bahwa penulisan mengenai Sutan Sjahrir dicatat oleh Rosihan Anwar secara rinci dan emosional, tanpa melupakan tahanan politik lainnya (Anwar, 1981 dan 1983; dan Said, 2006:xiii).

Sementara itu, orientasi politik Mochtar Lubis juga tidak dapat dilepaskan dari PSI dan Sutan Sjahrir di satu sisi; tetapi di sisi lain, Mochtar Lubis bersimpati kepada TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat). Dalam hal ini, Mochtar Lubis telah menjadikan orientasi politiknya tidak hanya condong kepada PSI, namun juga kepada militer di Indonesia. Mochtar Lubis yakin dan percaya bahwa militer juga memiliki hak yang sama untuk berperan dalam administrasi dan pemerintahan Indonesia. Kedekatan dengan kalangan militer ini telah membuat surat kabar yang dipimpinnya, *Indonesia Raya*, sering dianggap sebagai surat kabar militer, meskipun tidak secara langsung para perwira militer terlibat didalamnya, tetapi sokongan dana dan bantuan lainnya jelas tidak dapat disangkal bahwa surat kabar yang dipimpin oleh Mochtar Lubis tersebut ada peranan dan bantuan dari pihak militer di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut bahwa *Indonesia Raya* merupakan surat kabar para komando tentara (cf Feith, 1995; Haryanto, 1996; Muhaimin, 2005; dan Hill, 2011:50).

Fenomena yang menunjukkan orientasi politik Mochtar Lubis mendukung militer di Indonesia adalah peristiwa 17 Oktober 1952, dimana ia berpendapat bahwa kejadian tersebut merupakan salah satu perkara yang menggambarkan pertentangan antara wakil-wakil rakyat dari kalangan politisi sipil di Parlemen dan kalangan militer mengenai program rasionalisasi Angkatan Bersenjata yang tidak disetujui oleh sebagian perwira militer (Compton, 1993; Feith, 2007; Ricklefs, 2008; dan Hill, 2011). Dalam konteks ini, Abdul Haris Nasution (1992) mengungkapkan bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 adalah masalah internal tentara, namun dieksploitasi secara politis oleh para politisi sipil di Parlemen. Mochtar Lubis juga sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Abdul Haris Nasution, yakni bahwa rencana rasionalisasi tentara tersebut memang harus dilakukan agar diperoleh tentara yang profesional, yang nampaknya tidak disetujui oleh Parlemen, terutama dari kalangan politisi sipil yang bergabung dalam PNI atau Partai Nasional Indonesia (cf Nasution, 1992:160; dan Hill, 2011:53).

Orientasi politik Mochtar Lubis, yang memberikan dukungan kepada militer di Indonesia, juga terlihat dalam peristiwa pemberontakan para perwira militer di daerah. Mochtar Lubis melihat bahwa kekacauan di daerah itu timbul karena sikap pemerintah Pusat yang terlalu berfokus kepada masalah-masalah elite yang ada di Jakarta; dan retaknya dwi-tunggal antara Soekarno dan Mohamad Hatta juga menjadi alasan kekacauan di daerah, yang melihat bahwa Mohamad Hatta merupakan perwakilan pemimpin dari daerah yang berada di Pusat (Noer, 1990; Ricklefs, 2008; dan Hill, 2011). Ketika pada tanggal 21 Desember 1956 terjadi penentangan daerah-daerah kepada pemerintah Pusat di Jakarta, Mochtar

Lubis (1980) meresponnya melalui pernyataan sebagai berikut:

[...] dan mengambil kesimpulan bahwa peristiwa ini pasti tidak akan terbatas di Sumatra Tengah belaka, tapi akan berakibat pula ke daerah-daerah lain. Juga saya tulis, bahwa kabinet Ali-Rum-Idham tidaklah akan dapat mengatasinya, demikian pula Presiden Soekarno sendiri, tanpa Bung Hatta, ataupun KSAD [Kepala Staf Angkatan Darat] Nasution saja.

Tajuk Rencana itu jelas menganjurkan agar Kabinet sebaiknya mundur, dan jika perlu untuk kepentingan yang lebih besar, maka Presiden Soekarno dan KSAD Nasution harus pula bersedia meninggalkan kedudukan mereka (Lubis, 1980:2).

Mochtar Lubis (1980) bersimpati kepada pemberontakan yang dilakukan oleh para perwira di daerah, karena ia melihat bahwa pemberontakan para perwira itu terjadi, mengingat pemerintah di Jakarta lebih fokus terhadap urusan di pusat, sehingga masalah-masalah yang muncul di daerah tidak begitu diperhatikan. Dalam konteks peristiwa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), Mochtar Lubis memang sempat diajak untuk menjadi bagian dari mereka, tetapi Mochtar Lubis – yang pada waktu itu menjadi seorang tahanan rumah – tidak ingin bergabung dan berjuang dengan cara-cara kekerasan. Mochtar Lubis lebih memilih untuk berjuang melalui pena, bukannya senjata (Lubis, 1980; Hadimadja ed., 1995:112; dan Hill, 2011). Namun pada akhirnya, Mochtar Lubis tetap dianggap terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Kolonel Zulkifli Lubis, berdasarkan pemberitaan oleh surat kabar *Indonesia Raya*, yang memuat surat-surat pribadi Kolonel Zulkifli Lubis kepada pemimpin redaksi *Indonesia Raya* di Jakarta (Haryanto, 1996; Ricklefs, 2008; dan Hill, 2011:62).

Selain itu, Mochtar Lubis juga dinilai menaruh simpati kepada PSI (Partai Sosialis Indonesia). PSI, dalam

pandangan Mochtar Lubis, adalah partai yang memang mengusung paham Sosialisme, yang menghargai dan menjunjung tinggi martabat manusia. Namun, di sisi lain, tindakan tokoh-tokoh yang ada di dalam partai tersebut khas seperti intelektual perkotaan yang tidak menunjukkan mereka bisa bergaul dengan rakyat kebanyakan, karena memiliki gaya hidup yang berbeda (Lubis, 1980 dan 1993; Legge, 1993; Ricklefs, 2008; dan Hill, 2011). Hal tersebut tergambar dalam sebuah petikan wawancara Mochtar Lubis, yang mengungkapkan bahwa:

Saya memang tertarik, ya, pada ide-ide sosialisme, keadilan, pemerataan. Tapi saya nggak pernah jadi anggota PSI. Saya tidak suka melihat tingkah-laku teman-teman yang aktif di sana. Saya dekat dengan almarhum Pak Sjahrir dan Djohan, Sekjennya, secara pribadi. Namun, saya sering kritik di depan mereka (dalam Hadimadja ed., 1995:112).

Mochtar Lubis (1980) mengetahui dan sadar tentang bagaimana PSI (Partai Sosialis Indonesia) sebenarnya ingin ikut dalam pemerintahan Presiden Soekarno, karena mereka memiliki teori untuk “menumpang pada pemerintahan, jika rezim Soekarno ambruk”. Meskipun niatnya baik, menurut Mochtar Lubis (1980), namun juga tidak dapat mengesampingkan kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang semakin kokoh; dan PSI sendiri tidak memiliki kekuatan di tengah-tengah rakyat banyak (Lubis, 1980:337).

Mochtar Lubis juga dekat dengan tokoh-tokoh MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Kedekatan dengan MASYUMI dibangun secara personal, seperti hubungan yang dibangun dengan Mohammad Natsir, salah seorang tokoh MASYUMI, yang sama-sama berasal dari Sumatera Barat. Pekerjaannya sebagai wartawan, menuntut Mochtar Lubis, adalah untuk melakukan konfirmasi kepada

tokoh-tokoh yang diberitakan dalam surat kabarnya, yakni *Indonesia Raya*. Ketika bulan puasa, misalnya, Mochtar Lubis selalu datang kepada Mohammad Natsir. Menjelang berbuka puasa, Mochtar Lubis selain dapat mengkonfirmasi suatu pemberitaan, ia juga dapat berdialog dengan Mohammad Natsir mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia (Lubis, 1992:464; Noer, 2000; dan Hill, 2011).

Kedekatan Mochtar Lubis dengan tokoh-tokoh partai politik, terutama dari PSI dan MASYUMI, ternyata diamati dan dijadikan bukti oleh pemerintah Orde Lama (1959-1966), sehingga pada saat terjadi pembubaran PSI dan MASYUMI pada tahun 1960, tidak berapa lama kemudian, Mochtar Lubis juga ditangkap dengan alasan bahwa ia merupakan simpatisan dari kedua partai politik tersebut. Penangkapan yang dialamatkan kepadanya dinilai, dalam pandangan Mochtar Lubis, bukanlah sesuatu yang tepat, karena ia bukanlah anggota dari kedua partai politik tersebut (Lubis, 1978 dan 1980; Haryanto, 1996; Ricklefs, 2008; dan Hill, 2011).

Perkembangan politik yang terjadi di Indonesia bukan saja mendorong kedua tokoh ini, Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, mengambil sikap dalam merespon setiap hal yang terjadi selama zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966), tetapi sebagai seorang wartawan, mereka juga memiliki pandangan tersendiri mengenai kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers, dalam pandangan kedua tokoh ini, hendaknya adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab; tetapi keduanya juga memiliki cara pandang yang berbeda dalam memperjuangkan hal tersebut (Said ed., 1992; Compton, 1993; Feith, 1995; dan Hill, 2011).

Rosihan Anwar, misalnya, melihat bahwa kebebasan pers tidak dapat

terlepas dari keinginan pasar, yang tergantung kepada pembaca berita dan menghindari seminimal mungkin konfrontasi dengan pemerintah, sehingga sampai pada kesimpulan, meskipun menginginkan adanya kebebasan, pers harus mengikuti garis kebijakan pemerintah (Anwar, 1983 dan 1992; Said ed., 1992; dan Laily, 2016).

Wartawan yang berjiwa demokratis harus melancarkan perjuangannya dari daerah operasi manapun, yang disediakan baginya oleh rezim yang tengah berkuasa. Soal yang pokok ialah dia harus terus berjuang. Menjadi tugas kewajiban pers yang berjiwa demokratis dan wartawan-wartawan yang mengabdikan kepada cita-cita kemerdekaan pers untuk menyalakan terus aspirasi-aspirasi demokrasi berhadapan dengan tekanan dari pihak pemerintah dan mengobarkannya dengan memperkuat kepercayaan rakyat akan hak-haknya serta kesediaannya berjuang untuk hak-hak itu (Anwar, 1983:246-247; Lubis, 1992; Hill, 2011; dan Laily, 2016).

Sikap yang diambil oleh Rosihan Anwar dalam memperjuangkan kebebasan pers tidak jarang mendorong dia harus berhadapan dengan teman sejawat lainnya, yang tidak sepakat dengan tindakannya dalam memperjuangkan kebebasan pers. Tindakan yang dilakukan oleh Rosihan Anwar memang tidak disepakati oleh Mochtar Lubis, karena ia tetap memegang teguh kebebasan pers tanpa kompromi. Mochtar Lubis melihat bahwa kebebasan pers pada masa pemerintahan Soekarno (1959-1966) merupakan kebebasan pers yang semu, tidak jelas bagaimana kebebasan yang diberikan oleh pihak penguasa itu (Anwar, 1983; Lubis, 1992; Hill, 2011; dan Laily, 2016). Lebih lanjut, Mochtar Lubis (1992) menyatakan sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab berat ini hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh wartawan dan pers Indonesia dalam

iklim kebebasan pers Indonesia yang tidak semu, tetapi terang dan jernih. Tanpa kebebasan pers tidak mungkin menuntut tanggung jawab kepada pers. Sebaliknya, tanpa tanggung jawab, kebebasan pers dan wartawan akan kehilangan maknanya (Lubis, 1992:477).

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat jelas bahwa Mochtar Lubis (1992) merupakan pribadi yang menginginkan kebebasan dalam bidang pers, tetapi harus bertanggung jawab, sehingga perjuangan mengenai kebebasan pers tidak akan kehilangan maknanya. Namun, pengalamannya selama tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an, harapan tersebut hanya sekedar cita-cita karena perjuangan kebebasan pers dilakukan di balik tahanan penjara. Mochtar Lubis (1992) menilai bahwa yang dilakukan oleh pemerintah kepada dirinya sangatlah membatasi ruang gerak dalam memperjuangkan kebebasan pers (Lubis, 1992; dan Hill, 2011).

Hal tersebut terlihat dalam pernyataan yang mempertanyakan alasan dibalik penahanan Mochtar Lubis di akhir bulan Desember 1956; dan tindakan pemerintah yang tidak memperbolehkan dirinya untuk membaca surat kabar serta mengirimkan tulisan untuk surat kabarnya, yakni *Indonesia Raya*. Mochtar Lubis membandingkan kondisi dirinya yang ditahan pada waktu itu, 1960-an, dengan ketika Soekarno ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930-an, tetapi Soekarno masih mendapat kesempatan untuk membaca, menulis, dan mengirimkan karangannya kepada surat kabar milik PARTINDO (Partai Indonesia), sehingga tindakan pemerintah kepadanya pada tahun 1960-an dinilai tidak adil (Lubis, 1980:36; Hill, 2011; dan Aprianto, 2018).

Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, baik Rosihan Anwar maupun Mochtar Lubis menyadari bahwa kebebasan pers

yang sesungguhnya memang sulit diwujudkan di Indonesia (Lubis, 1980; Anwar, 1981 dan 1983; dan Hill, 2011). Hal tersebut didasarkan pada keberlangsungan kehidupan pers itu sendiri, yang harus bisa bertahan hidup pada zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di Indonesia, dan dalam kenyataannya – baik surat kabar *Pedoman* milik Rosihan Anwar maupun *Indonesia Raya* milik Mochtar Lubis – masih mendapat kekangan, dan bahkan pembredelan, dari pihak penguasa (Smith, 1986; Haryanto, 1996; Surjomihardjo ed., 2002; dan Suwirta, 2008).

KESIMPULAN ²

Latar belakang kehidupan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, keduanya merupakan tokoh pers yang berasal dari Sumatera, dengan suku yang berbeda. Rosihan Anwar berasal dari suku Minangkabau di Sumatera Barat, yang memiliki darah keturunan Jawa; manakala Mochtar Lubis berasal dari suku Mandailing di Sumatera Utara. Keduanya merupakan anak dari ayah yang bekerja sebagai pamong praja pada masa pemerintah kolonial Belanda. Kedua orang tuanya memiliki perhatian terhadap bidang pendidikan anak-anaknya. Rosihan Anwar mendapatkan pendidikan bergaya Barat milik pemerintah kolonial Belanda; dan Mochtar Lubis juga mengenyam pendidikan di sekolah yang bergaya Barat juga, tapi milik

²**Sebuah Pengakuan:** Artikel ini – sebelum diubah-suai dan direvisi dalam bentuknya sekarang – merupakan Ringkasan Skripsi Sarjana dari Penulis I (Desi Rusmiati), yang dibimbing oleh Penulis II (Andi Suwirta) dan Penulis III (Moch Eryk Kamsori). Penulis I mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu dalam proses penelitian, penulisan, dan penyelesaian Skripsi Sarjana di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung; dan lulus Sarjana Pendidikan Sejarah pada tahun 2016. Walau bagaimanapun, semua isi dan interpretasi dalam artikel ini menjadi tanggung jawab akademik kami bertiga, selaku Penulis I, II, dan III.

pihak swasta, pada zaman kolonial Belanda di Indonesia.

Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis terhadap konsep dan pelaksanaan sistem Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di Indonesia memiliki segi-segi perbedaan dan persamaan sekaligus. Rosihan Anwar, misalnya, menilai bahwa konsep Demokrasi Liberal tidak selalu memiliki makna yang negatif, karena ia melihat bahwa untuk mencapai cita-cita menjadi negara yang demokratis harus ditempuh dengan langkah-langkah yang demokratis pula. Sementara itu, Mochtar Lubis tidak sepakat dengan pemberlakuan konsep Demokrasi Liberal, karena Indonesia belum memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang siap untuk menjalankan syarat-syarat sebagai negara yang demokrasi. Namun dalam banyak hal, baik Rosihan Anwar maupun Mochtar Lubis tidak setuju dengan penerapan sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia, karena kedua tokoh ini menilai bahwa dengan menggunakan konsep tersebut maka menghilangkan cita-cita negara demokrasi.

Orientasi politik Rosihan Anwar memberikan dukungannya terhadap paham Sosialisisme, yang dipelopori oleh PSI (Partai Sosialis Indonesia) dengan tokoh sentral yang ada di partai tersebut tidak lain adalah Sutan Sjahrir. Sedangkan Mochtar Lubis tidak hanya bersimpati kepada PSI, tetapi juga MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), walaupun ada beberapa catatan dan kritik mengenai kedua partai tersebut darinya. Mochtar Lubis juga memberikan dukungannya kepada TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat), karena ia menilai bahwa tentara juga memiliki kemampuan untuk mengelola negara. Hal itu tidak terlepas dari lingkungan pergaulan Mochtar Lubis, yang dekat dengan para perwira tentara di Indonesia.

Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis terhadap kebebasan pers di Indonesia, sama-sama menyatakan bahwa jika pers ingin menjalankan fungsinya dengan baik, maka harus ada kebebasan yang diberikan kepada pers disertai dengan rasa tanggung jawab. Rosihan Anwar, misalnya, memperjuangkan kebebasan pers dengan melihat situasi dan kondisi di Indonesia. Meskipun ia berjuang untuk kebebasan pers, tetapi jangan sampai pers merugikan pihak lain, sebagaimana dintunjukkan oleh pers yang dikelolanya, yakni surat kabar *Pedoman* di Jakarta.

Sedangkan Mochtar Lubis, sebagai pemimpin redaksi surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta, tidak segan-segan untuk memberitakan dan memberi pandangan (*news and views*) yang tidak diharapkan dan tidak disenangi oleh pemerintah, pejabat-pejabat negara, bahkan termasuk Presiden Soekarno sendiri, sehingga konsekuensi yang harus diterima dalam memperjuangkan kebebasannya itu, ia harus mendekam didalam rumah tahanan dan sering mengalami siklus tangkap dan lepas. Sikap Mochtar Lubis yang tegas dan keras dalam membela kebebasan pers di Indonesia itu acapkali memicu konflik antara dirinya dengan pihak penguasa, yang alergi dengan kritik dan kebebasan pers di Indonesia.³

Referensi

- Abdurahman, Dudung. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruzz.
- Adams, Cindy. (2014). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, Terjemahan.

³**Pernyataan:** Kami, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya kami bertiga; ianya bukan hasil plagiat, sebab sumber-sumber yang kami rujuk dan dijadikan bahan analisis kajian, sangat jelas tercantum dalam Referensi atau Daftar Pustaka. Kami juga menyatakan bahwa artikel ini belum pernah direviu dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya.

- Alfarisi, Salman. (2010). *Mohammad Hatta: Biografi Singkat, 1902-1980*. Jogjakarta: Penerbit Garasi.
- Ali, Fachry. (1993). "Pengantar: Dinamika Sosial-Politik Indonesia Tahun Lima Puluhan" dalam Boyd R. Compton. *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Terjemahan.
- Ali, Moh. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Amri, M. (2008). "Auto/Biografi Indonesia: Sejarah dan Telaah Singkat" dalam *Jurnal Bahasa dan Seni*, Volume 36(1), hlm.49-58.
- Anwar, Rosihan. (1981). *Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia, 1961-1965*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Anwar, Rosihan. (1983). *Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Anwar, Rosihan. (1992). "Wartawan, Demokrasi, dan Pembangunan Nasional" dalam Tribuana Said [ed]. *H. Rosihan Anwar: Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta: Penerbit Kompas, hlm.217-230.
- Anwar, Rosihan. (2006). *Soekarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik, 1961-1965*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Aprianto, Bangkit. (2018). "Sejarah Perkembangan Surat Kabar Indonesia Raya, 1949-1974". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP USD [Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma]. Tersedia secara online juga di: http://repository.usd.ac.id/31540/2/131314002_full.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Atmakusumah [ed]. (1992). *Mochtar Lubis: Wartawan Jihad*. Jakarta: Harian Kompas.
- Atmakusumah [ed]. (1997). *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya*, Jilid I. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Burke, Peter. (2008). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Compton, Boyd R. (1993). *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Terjemahan.
- Crouch, Harold. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Daud, S. (2013). "Antara Biografi dan Historiografi" dalam *Jurnal Analisis*, Volume 13(1), hlm.243-270.
- Feith, Herbert. (1995). *Sokarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Sinar Harapan, Terjemahan.
- Feith, Herbert. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, terjemahan Nugroho Katjasungkana et al.
- Feith, Herbert. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Frederick, William & Soeri Soeroto [eds]. (2005). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: Penerbit LP3ES, edisi revisi.
- Gaffar, Affan. (2000). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosttchlak, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia] Press.
- Hadimadja, R.K. [ed]. (1995). *Mochtar Lubis Bicara Lurus: Menjawab Pertanyaan Wartawan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Hakiki, Paizon, Marwoto Saiman & Syofyan Suri. (2011). "Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal, Tahun 1949-1959". Tersedia secara online di: <https://media.neliti.com/media/publications/206618-none.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Juli 2018].
- Hamid, I. (2004). *Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Haryanto, Ignatius. (1996). *Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran Indonesia Raya*. Jakarta: Penerbit LSPP [Lembaga Studi Pers dan Pembangunan].
- Hatta, Mohamad. (1957). "Demokrasi Terpimpin atau Meletjehkan Demokrasi?" dalam surat kabar *Pedoman*. Djakarta: 27 Agustus.
- Hatta, Mohamad. (2004). *Demokrasi Kita: Idealisme dan Realitas serta Unsur yang Memperkuatnya*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Hill, David T. (2011). *Jurnalisme dan Politik Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Terjemahan.
- Hutauruk, A. (2008). "Media sebagai Kontrol Sosial: Tajuk-tajuk tentang Politik dalam Warta Sepekan SIASAT, 1950-1957". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI [Universitas Indonesia].
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Kartasasmita, G. et al. (1981). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Penerbit Setneg RI [Sekertaris Negara Republik Indonesia].
- Kartodirdjo, Sartono. (2014). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo. (1995). *Metodologi Sejarah*.

- Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Laily, Hamidah Izzatu. (2016). "Rosihan Anwar dan Pers Indonesia: Studi Eksploratif pada Pemikiran Rosihan Anwar Terkait Pers di Indonesia". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Malang: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNIBRAW [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya]. Tersedia secara online juga di: https://www.academia.edu/34525641/ROSIHAN_ANWAR_DAN_PERS_INDONESIA [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Juli 2018].
- Legge, John D. (1993). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
- Legge, John D. (1996). *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Lev, Daniel S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Lubis, Mochtar. (1978). *Senja di Jakarta*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Lubis, Mochtar. (1980). *Catatan Subversif*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Lubis, Mochtar. (1992). "Etos Pers Indonesia" dalam Atmakusumah [ed]. *Mochtar Lubis: Wartawan Jihad*. Jakarta: Penerbit Kompas, hlm.459-484.
- Lubis, Mochtar. (1993). *Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Maarif, Ahmad Syafii. (1996). *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahmud, M. (1992). "Pembredelan Pedoman: Sirnanya suatu Harapan" dalam Tribuana Said [ed]. *H. Rosihan Anwar: Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta: Penerbit Kompas, hlm.111-128.
- Muhaimin, Yahya A. (2005). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia, 1945-1988*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, Abdul Haris. (1992). "Mochtar Lubis: Wartawan Pejuang" dalam Atmakusumah [ed]. *Mochtar Lubis: Wartawan Jihad*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas, hlm.156-166.
- Nasution, Adnan Buyung. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante, 1956-1959*. Jakarta: Penerbit Grafiti Pers.
- Noer, Deliar. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Noer, Deliar. (2000). *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia, 1945-1965*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Permadi, Singgih Bambang. (2014). "Proses Pemilihan Umum 1955 di Indonesia". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: <https://eprints.uny.ac.id/21750/9/ringkasan.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Juli 2018].
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Jakarta: Penerbit Serambi, Terjemahan.
- Said, Salim. (2006). "Dari Permainan Segitiga ke sebuah Prahara" dalam Rosihan Anwar. *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik, 1961-1965*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia], hlm.x-xiv.
- Said, Tribuana. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Said, Tribuana [ed]. (1992). *H. Rosihan Anwar: Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sanit, Arbi. (1997). *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Semma, M. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Sjamsuddin, Heliuss. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Smith, Edward C. (1986). *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Pers, terjemahan Atmakusumah. "Soal Pengakuan: Pembubaran Partai2" dalam surat kabar *Pedoman*. Djakarta: 7 Djuli 1960, hlm.3.
- Soebagijo, I.N. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Solehuddin, A. (2015). "Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965" dalam *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 3(1), hlm.69-81.
- Suhadi, Imam. (1981). *Pemilihan Umum 1955, 1971, dan 1977: Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit FH-UII [Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia].
- Supriatna, Nana. (2006). *Sejarah Nasional dan Dunia untuk SMA Kelas III*. Bandung: PT Grafindo.
- Surjomihardjo, Abdurrachman [ed]. (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Surat Kabar di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suwirta, Andi. (2004). "Atang Ruswita, Pikiran Rakyat, dan Kritik Sosial" dalam Asmawi Zainul & Didin Saripudin [eds]. *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1954-2004: Mozaik Pemikiran tentang Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Budaya*. Bandung: Historia Utama Press.
- Suwirta, Andi. (2008). "Dinamika Kehidupan

- Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional” dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 1(2), hlm.47-85.
- Suwirta, Andi. (2010). “Dua Negara-Bangsa Melihat Masa Lalunya: Konfrontasi Indonesia – Malaysia (1963-1966) sebagaimana Dikisahkan dalam Buku-buku Teks Sejarahnya di Sekolah” dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 3(2), hlm.243-258.
- Wardaya, Baskara T. (2004). “Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955” dalam *Jurnal Basis*, No.03-04 [Maret-April]. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wijaya, A. (2014). “Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia” dalam *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 4(1), hlm.137-158.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].



Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dengan Surat Kabarnya
(Sumber: Koleksi Pribadi Penulis, 9/10/2017)

Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, baik Rosihan Anwar maupun Mochtar Lubis menyadari bahwa kebebasan pers yang sesungguhnya memang sulit diwujudkan di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada keberlangsungan kehidupan pers itu sendiri, yang harus bisa bertahan hidup pada zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di Indonesia, dan dalam kenyataannya masih mendapat kekangan, dan bahkan pembredelan, dari pihak penguasa.